

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target Pendapatan Daerah dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2011 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan pembiayaan.

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Jambi tidak membuat kebijakan terhadap sumber penerimaan baru, akan tetapi lebih mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah pada tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah dan Tarif yang diatur didalamnya terdiri dari :
 - Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Air Permukaan
 - Pajak Rokok
2. Penerapan Samsat Keliling, dimana Samsat Keliling ini adalah bentuk pelayanan prima yang dilakukan oleh petugas Samsat di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota untuk mendekati Wajib Pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

3. Pembentukan Pos Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, pada Tahun 2011 telah dibangun 4 (empat) pos Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yakni :
 - Pos Pelayanan di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo
 - Pos Pelayanan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi
 - Pos Pelayanan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
 - Pos Pelayanan di Kecamatan Tempino Kabupaten Muaro Jambi
4. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, adalah suatu upaya untuk menghapuskan Pajak dan Denda terhadap Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor. 2 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 dan Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011. Pelaksanaannya selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2011. Hal ini berdampak positif terhadap penerimaan pajak tersebut, yaitu terealisasi sebesar Rp46.838.816.702,00 dan ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Pelaksanaan Pajak Progresif, yang bertujuan untuk :
 - Menjaring Bea Balik Nama bagi pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu (BBN-II).
 - Meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Perhitungan besaran jumlah pajak yang terhutang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah. Pajak Progresif ini mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2011.

6. Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Luar Daerah, dengan tarif 0% mulai dilaksanakan tanggal 1 November 2011 sampai dengan 31 April 2012.
7. Razia rutin kendaraan bermotor, kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Pendapatan Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kepolisian dan PT. Jasa Raharja. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-II. Dalam pelaksanaannya Tim menjaring pemilik kendaraan yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kendaraan dengan Nomor Polisi luar Provinsi Jambi yang beroperasi di Provinsi Jambi.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah, hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan khususnya pada sisi pajak selama tahun 2011.

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Selama tahun 2011 pendapatan daerah memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan yang mengalami peningkatan sebesar 127,04% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.635.666.379.680,00 terealisasi sebesar Rp2.078.015.400.499,22. Jika dibandingkan pada tahun 2010 realisasi pendapatan daerah provinsi Jambi meningkat sebesar 26,69% yaitu dari 1.640.185.857.679,45 pada tahun 2010 menjadi 2.078.015.400.499,22 pada tahun 2011. Realisasi PAD tahun anggaran 2011 sebesar Rp983.441.066.621,22 atau terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 30,18% dibandingkan dengan realisasi PAD tahun anggaran 2010 sebesar Rp686.629.362.314,45.

Dana perimbangan pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp1.075.207.719.996,00 atau 110,16% dari target yang ditetapkan, capaian penerimaan inipun lebih besar 13,30% dibandingkan dengan tahun 2010. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan dari pemerintah, badan/lembaga/organisasi dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya. Untuk lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp19.366.613.882,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2011

No	Pendapatan	2010	2011*	+/- (%)
1	Pendapatan Asli Daerah			
	Target	535.753.443.786,00	641.658.215.660,00	16,50
	Realisasi	686.629.362.314,45	983.441.066.621,22	30,18
	Lebih (Kurang)	150.875.918.528,45	341.782.850.961,22	
	Realisasi (%)	128,16	153,27	
2	Dana Perimbangan			
	Target	838.305.780.041,00	976.008.164.020,00	14,11
	Realisasi	932.205.659.790,00	1.075.207.719.996,00	13,30
	Lebih (Kurang)	93.899.879.749,00	99.199.555.976,00	
	Realisasi (%)	111,2	110,16	
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah			
	Target	21.127.373.075,00	18.000.000.000,00	-
	Realisasi	21.350.835.575,00	19.366.613.882,00	-9,29
	Lebih (Kurang)	223.462.500,00	1.366.613.882,00	
	Realisasi (%)	101,06	-	
	Jumlah Pendapatan Daerah			
	Target	1.395.186.596.902,00	1.635.666.379.680,00	17,24
	Realisasi	1.640.185.857.679,45	2.078.015.400.499,22	26,69
	Lebih (Kurang)	244.999.260.777,45	442.349.020.819,22	
	Realisasi (%)	117,56	127,04	

* Data Sementara, Biro Keuangan

3.1.2.1 Pendapatan Pajak Daerah

Secara umum pendapatan dari sektor Pajak Daerah pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp838.851.529.199,00 atau 157,53% dari target yang ditetapkan, realisasi pendapatan pajak daerah ini mengalami peningkatan sebesar 39,26% dari tahun 2010, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa PKB, BBN-KB dan PBB-KB merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2011, PKB terealisasi sebesar Rp257.250.390.702,00 atau 122,26% dari target yang ditetapkan dan penerimaan jenis ini juga mengalami peningkatan sebesar 26,52% jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2010.

PBB-KB terealisasi sebesar Rp183.844.593.314,00 atau 133,45% dari target yang ditetapkan pada tahun 2011, realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun anggaran 2011 juga lebih besar 30,70% dari realisasi penerimaan tahun 2010.

Penerimaan dari BBN-KB terealisasi sebesar Rp396.544.939.977,00 atau 216,06% di atas target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya mengalami peningkatan hingga 54,09%.

Selain ketiga sumber penerimaan pajak daerah tersebut, penerimaan pajak lainnya (Pajak kendaraan diatas air, Bea balik nama kendaraan diatas air serta Pajak air permukaan) juga memberikan kontribusi untuk Provinsi Jambi, walaupun masih terbilang kecil terhadap pendapatan daerah. Namun diharapkan pada masa mendatang akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2010 – 2011

NO	PAJAK	2010	2011*	+/- (%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor			
	Target	170.000.000.000,00	210.411.574.000,00	23,77
	Realisasi	203.335.568.273,00	257.250.390.702,00	26,52
	Lebih (Kurang)	33.335.568.273,00	46.838.816.702,00	
	Realisasi (%)	119,61	122,26	
2	Pajak Kendaraan di Atas Air			
	Target	60.000.000,00	66.000.000,00	10
	Realisasi	58.808.150,00	67.777.300,00	15,25
	Lebih (Kurang)	-1.191.850,00	1.777.300,00	
	Realisasi (%)	98,01	102,69	
3	BBN Kendaraan Bermotor			
	Target	155.000.000.000,00	183.531.000.000,00	18,41
	Realisasi	257.348.835.580,00	396.544.939.977,00	54,09
	Lebih (Kurang)	102.348.835.580,00	213.013.939.977,00	
	Realisasi (%)	166,03	216,06	
4	BBN Kendaraan di Atas Air			
	Target	726.000,00	800.000,00	10,19
	Realisasi	891.100,00	1.821.100,00	104,37
	Lebih (Kurang)	165.100,00	1.021.100,00	
	Realisasi (%)	122,74	227,64	
5	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
	Target	130.000.000.000,00	137.760.000.000,00	5,97
	Realisasi	140.663.454.585,00	183.844.593.314,00	30,7
	Lebih (Kurang)	10.663.454.585,00	46.084.593.314,00	
	Realisasi (%)	108,2	133,45	

NO	PAJAK	2010	2011*	+/- (%)
6	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah			
	Target	63.000.000,00	-	-
	Realisasi	76.023.620,00	-	-
	Lebih (Kurang)	13.023.620,00	-	
	Realisasi (%)	120,67	-	
7	Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan			
	Target	672.000.000,00	743.200.000,00	10,6
	Realisasi	871.720.781,00	1.142.006.806,00	31,01
	Lebih (Kurang)	199.720.781,00	398.806.806,00	
	Realisasi (%)	129,72	153,66	
	Jumlah Pajak Daerah			
	Target	455.795.726.000,00	532.512.574.000,00	16,83
	Realisasi	602.355.302.089,00	838.851.529.199,00	39,26
	Lebih (Kurang)	146.559.576.089,00	306.338.955.199,00	
	Realisasi (%)	132,15	157,53	

3.1.2.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan dari retribusi daerah di Provinsi Jambi diperoleh dari Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Pemakaian kekayaan daerah. Penerimaan daerah tahun anggaran 2011 dari retribusi sebesar Rp10.018.135.639,00 atau mencapai 134,24% diatas target yang ditetapkan. Penerimaan ini lebih kecil dari penerimaan Tahun 2010, hal disebabkan perpindahan item penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan (pendapatan retribusi BLUD RSUD. Raden Mattaher dan pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa) ke Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Hal ini tidak mengurangi Total Pendapatan Daerah karena hanya bergeser Pos Penerimaan saja.

Tabel 3.3. Perkembangan Retribusi Daerah Tahun 2010-2011

Retribusi	2010	2011*	+/- (%)
Retribusi Jasa Umum			
Target	39.826.300.000,00	686.500.000,00	-98,28
Realisasi	37.740.826.291,00	926.948.150,00	-97,54
Lebih (Kurang)	-2.085.473.709,00	240.448.150,00	
Realisasi (%)	94,76	135,03	
Retribusi Jasa Usaha			
Target	4.803.722.500,00	6.119.287.500,00	27,39
Realisasi	5.379.288.134,00	8.239.629.089,00	53,17
Lebih (Kurang)	575.565.634,00	2.120.341.589,00	
Realisasi (%)	111,98	134,65	

RETRIBUSI	2010	2011*	+/- (%)
Retribusi Jasa Umum			
Target	39.826.300.000,00	686.500.000,00	-98,28
Realisasi	37.740.826.291,00	926.948.150,00	-97,54
Lebih (Kurang)	-2.085.473.709,00	240.448.150,00	
Realisasi (%)	94,76	135,03	
Retribusi Jasa Usaha			
Target	4.803.722.500,00	6.119.287.500,00	27,39
Realisasi	5.379.288.134,00	8.239.629.089,00	53,17
Lebih (Kurang)	575.565.634,00	2.120.341.589,00	
Realisasi (%)	111,98	134,65	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
Target	319.000.000,00	657.000.000,00	105,96
Realisasi	489.515.640,00	851.558.400,00	73,96
Lebih (Kurang)	170.515.640,00	194.558.400,00	
Realisasi (%)	153,45	129,61	
Jumlah Retribusi Daerah			
Target	44.949.022.500,00	7.462.787.500,00	-83,4
Realisasi	43.609.630.065,00	10.018.135.639,00	-77,03
Lebih (Kurang)	-1.339.392.435,00	2.555.348.139,00	
Realisasi (%)	97,02	134,24	

*) Data Sementara, Biro Keuangan

3.1.2.3 Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah terdiri dari atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan perusahaan milik swasta antara lain Bank Jambi, Asuransi Bangun ASKRIDA dan PT. JSP (Jambi Saptamanunggal Pratama)

Tabel 3.4 Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2010-2011

NO	PAJAK	2010	2011*	+/- (%)
1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD			
	Target	10.656.827.350,00	10.656.827.350,00	-
	Realisasi	12.101.188.008,97	20.905.871.802,92	72,76
	Lebih (Kurang)	1.444.360.658,97	10.249.044.452,92	
	Realisasi (%)	113,55	196,17	
2	Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta			
	Target	499.262.536,00	450.000.000,00	-9,87
	Realisasi	342.332.354,00	797.276.905,00	132,9
	Lebih (Kurang)	-156.930.182,00	347.276.905,00	
	Realisasi (%)	68,57	177,17	

NO	PAJAK	2010	2011*	+/- (%)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
	Target	11.156.089.886,00	11.106.827.350,00	-0,44
	Realisasi	12.443.520.362,97	21.703.148.707,92	74,41
	Lebih (Kurang)	1.287.430.476,97	10.596.321.357,92	
	Realisasi (%)	111,54	195,4	

*) Data Sementara, Biro Keuangan

Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian realisasi pada tahun 2011 sebesar Rp21.703.148.707,92 atau 195,40% di atas target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun anggaran 2010 terjadi peningkatan sebesar 74,41%.

3.1.2.4 Lain-lain PAD

Penerimaan dari jenis Lain-lain PAD terdiri Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Bunga Deposito, Sumbangan Pihak Ketiga dan Penerimaan Lain-lain.

Tabel 3.5. Perkembangan Lain-lain PAD Tahun 2010-2011

Lain-lain PAD	2010	2011*	+/- (%)
Target	23.852.605.400,00	90.576.026.810,00	279,73
Realisasi	28.220.909.797,48	112.868.253.075,30	299,95
Lebih (Kurang)	4.368.304.397,48	22.292.226.265,30	
Realisasi (%)	118,31	124,61	

*) Data Sementara, Biro Keuangan

Pada tahun 2011, penerimaan Lain-lain PAD terealisasi sebesar Rp112.868.253.075,30 atau mencapai 124,61% dari target yang ditetapkan atau meningkat 299,95% dari tahun 2010.

3.1.2.5 Dana Perimbangan

Selama tahun 2011 penerimaan dari Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah terealisasi sebesar Rp1.075.207.719.996,00 atau mencapai 110,16% dari target yang telah ditetapkan, penetapan target inipun mengalami peningkatan sebesar 16,43% dari tahun sebelumnya, rincian sebagaimana tabel 6.

Target penerimaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 11,60% dari target tahun 2010 dan penerimaan dari jenis ini terealisasi sebesar Rp466.586.706.996,00 atau telah mencapai 127% dari target yang ditetapkan.

Target Dana alokasi umum pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 19,39% dari target tahun 2010 dan telah terealisasi 100% dengan capaian sebesar Rp583.882.413.000,00.

Begitu pula dengan dana alokasi khusus, pada tahun 2011 terjadi peningkatan target sebesar 23,49% dibanding dengan target tahun 2010. Pada tahun 2011 Dana Alokasi Khusus telah terealisasi 100,00% dengan capaian sebesar Rp24.735.600.000,00.

Tabel 3.6. Perkembangan Dana Perimbangan Periode 2010-2011

URAIAN	2010			2011			2010 : 2011	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	Target (%)	Realisasi (%)
Dana Perimbangan	838.305.780.041	932.205.659.790	11,20	976.008.164.020	1.075.207.719.996	10,16	16,43	0,15
Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	329.206.359.041	423.432.188.790	28,62	367.390.151.020	466.589.706.996	27,00	11,6	10,19
Bagi Hasil Pajak	131.823.001.958	151.733.011.309	15,10	138.441.411.289	165.268.385.425	19,38	5,02	8,92
Bagi Hasil dari PBB	110.371.992.667	125.423.256.834	13,64	116.767.613.077	132.003.273.873	13,05	5,79	5,25
Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.000.000.000	4.880.815.827	62,69	0	2.205.739		-100	-99,95
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	637.306.745	728.585.299	14,32	660.702.719	660.702.719	0,00	3,67	-9,32
Bagi Hasil dari PPh Psl 25 dan Psl 29 WP orang pribadi dalam negeri	0	0	0,00	0	1.716.550.541	0,00	0	0
PPOH dan PPH21	17.813.702.546	20.700.353.349	16,20	21.673.798.212	31.546.355.272	45,55	21,67	52,4
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	197.383.357.083	271.699.177.481	37,65	228.948.739.731	301.321.321.571	31,61	15,99	10,9
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	0		16.087.947	302.700.350	1781,53	0	0
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	7.395.177.790	892.025.470	-87,94	0	1.659.524.634		-100	86,04
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	250.000.000	255.004.652	2,00	250.000.000	766.290.747	206,52	0	200,5
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.000.000.000	10.599.982.968	960,00	7.202.646.270	9.042.692.904	25,55	620,26	-14,69

URAIAN	2010			2011			2010 : 2011	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	Target (%)	Realisasi (%)
Bagi Hasil dari Pertambang an Minyak Bumi	90.384.300.211	114.426.301.495	26,60	78.189.799.429	125.333.724.484	60,29	-13,49	9,53
Bagi Hasil dari Pertamb.Gas Bumi	92.724.153.478	139.420.051.023	50,36	133.629.503.366	156.984.626.744	17,48	44,12	12,6
BP-PBB.	5.629.725.604	6.105.811.873	8,46	9.000.000.000	6.571.058.989	- 26,99	59,87	7,62
DAU	489.069.421.000	488.743.471.000	-0,07	583.882.413.000	583.882.413.000	0,00	19,39	19,47
DAK	20.030.000.000	20.030.000.000	0,00	24.735.600.000	24.735.600.000	0,00	23,49	23,49
DAK Bidang Infra Struktur	16.103.400.000	16.103.400.000	0,00	17.656.900.000	11.818.669.680	- 33,06	9,65	-26,61
DAK Bidang Kesehatan	3.926.600.000	3.926.600.000	0,00	3.061.900.000	3.062.267.280	0,01	-22,02	-22,01
Dana Penyesuaian/Tunjangan Pendidikan				0	5.837.601.600			
DAK Bidang Kehutanan				883.700.000	883.060.920	-0,07		
DAK Bidang Perikanan				3.133.100.000	3.134.000.520	0,03		

3.1.2.6 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada tahun 2011 penerimaan jenis ini terealisasi sebesar Rp19.366.613.882,00 .

Tabel 3.7. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2010-2011

URAIAN	2010		%	2011		%
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	21.127.373.075	21.350.835.575	1,06	18.000.000.000	19.366.613.882	7,59
Pendapatan Hibah	0	424.875.000		0	1.366.613.882	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0	424.875.000		0	1.366.613.882	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21.127.373.075	20.925.960.575	-0,95			
Dana Penyesuaian	21.127.373.075	20.925.960.575	-0,95			
Dana Sistem Informasi Pengelola an Keuangan Daerah (SIPKD)	1.000.000.000	1.000.000.000	0			
Dana Penguatan Pemb. Pertanian/Perkebunan	19.724.548.075	19.724.548.075	0			
Dana Tambahan Peng. Bagi Guru PNSD	402.825.000	201.412.500	-50			
Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang				18.000.000.000	18.000.000.000	0
Dana Percepatan Pemb. Infrastruktur Daerah (DPPID)				18.000.000.000	18.000.000.000	0
Dana Percepatan Pemb. Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Kesehatan				18.000.000.000	18.000.000.000	0

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD tahun anggaran 2010 dan 2011

KODE	URAIAN	Tahun Anggaran 2010		Tahun Anggaran 2011*)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.395.186.596.902	1.640.185.857.679,45	1.635.666.379.680	2.078.015.400.499,22
4.1	Urusan Wajib	1.393.563.074.402	1.638.442.342.374,45	1.629.286.029.680	2.074.470.952.569,22
4.1.02	Kesehatan	40.699.908.750	37.566.723.256,00	63.915.409.500	58.185.762.660,30
4.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	1.449.908.750	630.123.850,00	3.415.212.500	4.422.230.468,30
4.1.02.1.02.02	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	34.750.000.000	32.755.701.759,00	54.000.197.000	47.472.156.091,00
4.1.02.1.02.03	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	4.500.000.000	4.180.897.647,00	6.500.000.000	6.291.376.101,00
4.1.03	Pekerjaan Umum	135.000.000	172.152.659,00	170.000.000	191.152.909,00
4.1.03.1.03.06	Dinas Pekerjaan Umum	135.000.000	172.152.659,00	170.000.000	191.152.909,00
4.1.07	Perhubungan	10.800.000	64.754.500,00	60.500.000	63.221.200,00
4.1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan	10.800.000	64.754.500,00	60.500.000	63.221.200,00
4.1.08	Lingkungan Hidup	200.000.000	338.355.800,00	400.000.000	505.939.800,00
4.1.08.1.08.02	Badan Lingkungan Hidup	200.000.000	338.355.800,00	400.000.000	505.939.800,00
4.1.13	Sosial			0	1.355.113.882,00
4.1.13.1.13.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	1.355.113.882,00
4.1.14	Tenaga Kerja	14.000.000	18.755.000,00	16.000.000	16.260.000,00
4.1.14.1.14.02	Dinas Sosnakertrans	14.000.000	18.755.000,00	16.000.000	16.260.000,00
4.1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.000.000	7.202.000,00	7.000.000	7.560.000,00
4.1.15.1.15.01	Dinas Koperasi UM KM	7.000.000	7.202.000,00	7.000.000	7.560.000,00
4.1.17	Kebudayaan	87.600.000	104.632.100,00	102.500.000	183.862.700,00
4.1.17.1.17.02	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	87.600.000	104.632.100,00	102.500.000	183.862.700,00
4.1.18	Pemuda dan Olah Raga	1.422.500.000	1.659.565.000,00	1.501.437.500	1.831.997.000,00
4.1.18.1.18.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	1.422.500.000	1.659.565.000,00	1.501.437.500	1.831.997.000,00

KODE	URAIAN	Tahun Anggaran 2010		Tahun Anggaran 2011*)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
4.1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat	1.350.985.265.652	1.598.079.727.059,45	1.561.403.182.680	2.010.538.502.417,92
4.1.20.1.20.03	Sekretariat Daerah	33.966.386.536	40.589.274.765,45	1.026.888.108.680	1.169.098.404.618,92
4.1.20.1.20.08	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	1.700.000.000	1.913.425.000,00	1.902.500.000	2.461.700.000,00
4.1.20.1.20.11	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	455.885.726.000	602.445.406.929,00	532.612.574.000	838.978.397.799,00
4.1.20.1.20.13	Biro Keuangan dan Aset (SKPKD)	859.433.153.116	953.131.620.365,00		
4.1.21	Kepegawaian	1.000.000	5.600.000,00	1.710.000.000	1.591.580.000,00
4.1.21.1.21.01	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1.000.000	5.600.000,00	1.710.000.000	1.591.580.000,00
4.1.26	Perpustakaan	0	424.875.000,00		
4.1.26.1.26.01	Badan Perpustakaan dan Arsip	0	424.875.000,00		
4.2	Urusan Pilihan	1.623.522.500	1.743.515.305,00	6.380.350.000	3.544.447.930,00
4.2.01	Pertanian	1.190.022.500	1.228.111.730,00	5.881.350.000	3.010.104.660,00
4.2.01.2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	56.000.000	72.605.000,00	3.811.000.000	165.056.000,00
4.2.01.2.01.02	Dinas Perkebunan	363.422.500	369.842.710,00	393.860.000	351.360.160,00
4.2.01.2.01.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	770.600.000	785.664.020,00	1.676.490.000	2.493.688.500,00
4.2.02	Kehutanan	14.000.000	36.700.000,00	35.000.000	51.750.000,00
4.2.02.2.02.01	Dinas Kehutanan	14.000.000	36.700.000,00	35.000.000	51.750.000,00
4.2.05	Kelautan dan Perikanan	157.000.000	164.355.040,00	173.000.000	174.481.820,00
4.2.05.2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	157.000.000	164.355.040,00	173.000.000	174.481.820,00
4.2.07	Perindustrian	262.500.000	314.348.535,00	291.000.000	308.111.450,00
4.2.07.2.07.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	262.500.000	314.348.535,00	291.000.000	308.111.450,00

* Data Sementara, Biro Keuangan

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Dari sisi penerimaan pembiayaan pada tahun 2010, hanya diperoleh dari SiLPA tahun lalu (Tahun Anggaran 2009) sebesar Rp201.204.876.815,00, sedangkan penerimaan penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang tidak terjadi transaksi. Realisasi pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada tahun 2010 adalah SiLPA tahun berkenaan (Tahun Anggaran 2010, data sementara) sebesar Rp354.674.124.905,00. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9. Perkembangan Pembiayaan Periode 2010-2011

Kode	Uraian	2010		2011*	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Surplus/(Defisit)	(201.204.876.814)	152.055.508.081,83	(303.260.384.056)	328.401.148.321,89
2	Pembiayaan Daerah				
2.1	Penerimaan Pembiayaan	201.204.876.814	201.204.876.814,52	353.260.384.056,35	353.260.384.396,35
2.1.1	SiLPA tahun anggaran sebelumnya	201.204.876.814	201.204.876.814,52	353.260.384.056,35	353.260.384.396,35
2.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
2.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
2.2.1.1	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jambi			50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
3	Pembiayaan Netto	201.204.876.814	201.204.876.814,52	353.260.384.056,35	303.260.384.396,35
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan		0		631.661.532.718,24

3.1.4 Permasalahan dan Solusi

Ada beberapa kendala dalam mengoptimalkan penerimaan disektor pajak dan retribusi daerah antara lain:

1. Banyaknya kendaraan dengan Nomor Polisi luar daerah yang beroperasi di Provinsi Jambi.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap peranan PKB dan BBN-KB sebagai sumber dana pembangunan daerah.

Melihat permasalahan tersebut, maka ada beberapa solusi yang perlu untuk dilaksanakan antara lain;

1. Mengoptimalkan razia rutin kendaraan bermotor dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan PT. Jasa Raharja, serta memberlakukan tarif 0% untuk Bea Balik Nama Kendaraan Luar Daerah BBN – II kendaraan luar daerah, yang pelaksanaannya mulai dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan 31 April 2012.
2. Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat wajib pajak tentang pentingnya membayar PKB dan memutasikan kendaraannya untuk dana pembangunan daerah, serta memberlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2011, pelaksanaan Pajak Progresif serta mempublikasikan Wajib Pajak yang tidak membayar pajak (untuk verifikasi) guna memberikan efek jera.
3. Mengoptimalkan 10 unit mobil Samsat Keliling untuk menjangkau Wajib Pajak pada tempat-tempat strategis termasuk pasar kalangan (pasar tradisional) dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

3.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Program Prioritas Pembangunan tahun anggaran 2010 sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya yang dijabarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2011 dengan mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada seluruh SKPD dengan satuan standar tertinggi. Alokasi target belanja daerah tahun 2011 sebesar Rp1.938.926.763.736,35 atau naik 21,46% dari tahun lalu yang terdiri dari alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari terget belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp1.749.614.252.177,33 atau naik 17,57% dari tahun lalu, capaian realisasi belanja daerah tahun 2011 hanya

sebesar 90,24% dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target belanja tahun 2011 karena adanya kegiatan pada SKPD Pekerjaan Umum yang tidak dapat dilaksanakan sesuai target serta adanya efisiensi dari berbagai pengeluaran namun tetap mengedepankan capaian target kinerja masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010–2011

NO	BELANJA	2010	2011*	+/- (%)
1	Belanja Tidak Langsung			
	Target	716.793.849.428,39	809.763.763.276,35	11,48
	Realisasi	672.267.046.822,62	759.840.717.762,83	11,53
	Lebih (Kurang)	-44.526.802.605,77	-49.923.045.513,52	
	Realisasai (%)	93,79	93,83	
2	Belanja Langsung			
	Target	879.597.624.287,61	1.129.163.000.460,00	22,1
	Realisasi	815.863.302.775,00	989.773.534.414,50	17,57
	Lebih (Kurang)	-63.734.321.512,61	-139.389.466.045,50	
	Realisasai (%)	92,75	87,66	
	Jumlah Belanja Daerah			
	Target	1.596.391.473.716,00	1.938.926.763.736,35	21,46
	Realisasi	1.488.130.349.597,62	1.749.614.252.177,33	17,57
	Lebih (Kurang)	-108.261.124.118,38	-189.312.511.559,02	
	Realisasai (%)	93,22	90,24	

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2011

Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah per SKPD tahun anggaran 2010 – 20110

Kode Rekening	Dinas/Instansi	Belanja Daerah Tahun 2010			Belanja Daerah Tahun 2011		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5.1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	165.011.749.286,17	154.838.654.807,00	93,83	160.784.028.969,00	149.988.858.127,00	93,29
5.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	33.773.647.337,00	31.190.443.150,00	92,35	42.518.412.231,00	40.364.298.211,00	94,93
5.1.02.1.02.02	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	94.770.522.474,00	88.690.215.597,00	93,58	143.578.448.550,00	132.043.965.201,00	91,97
5.1.02.1.02.03	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	19.372.171.660,53	17.700.355.368,00	91,37	25.573.059.768,00	24.331.858.845,00	95,15
5.1.03.1.03.06	Dinas Pekerjaan Umum	346.688.918.145,00	323.404.012.966,00	93,28	511.731.691.999,00	422.748.306.420,00	82,61
5.1.06.1.06.01	BAPPEDA	12.416.987.288,00	11.404.888.219,00	91,85	17.038.962.934,00	15.938.150.607,00	93,54
5.1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan	19.672.256.042,00	18.337.716.788,00	93,22	21.521.598.816,00	19.753.741.436,00	91,79
5.1.08.1.08.02	Badan Lingkungan Hidup	6.627.459.441,04	6.043.341.526,00	91,19	8.256.844.523,00	7.522.230.825,00	91,1
5.1.11.1.11.02	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB	9.704.599.326,75	8.964.330.922,00	92,37	9.630.868.814,00	8.878.177.769,00	92,18
5.1.13.1.13.01	Badan Penanggulangan Bencana	4.054.701.542,61	2.596.377.867,00	64,03	7.757.755.752,00	7.116.139.484,00	91,73
5.1.14.1.14.02	Dinas Sosnakertrans	29.877.793.282,00	28.215.283.941,00	94,44	32.626.041.138,00	30.502.858.444,00	93,49
5.1.15.1.15.01	Dinas Koperasi UMKM	8.254.241.037,34	7.834.195.727,00	94,91	11.265.573.805,00	10.618.878.050,00	94,26
5.1.16.1.16.01	Badan Koordinasi PMD	7.133.867.323,00	6.246.967.249,00	87,57	6.784.354.544,00	5.878.260.897,00	86,64
5.1.17.1.17.02	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.265.695.041,74	12.699.616.950,00	95,73	18.495.314.813,00	17.564.300.692,00	94,97
5.1.18.1.18.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	17.314.424.269,01	16.075.529.727,00	92,84	15.495.986.442,00	14.816.762.614,00	95,62
5.1.19.1.19.03	Satuan Polisi Pamong Praja	10.488.626.863,00	9.515.162.664,00	90,72	11.372.935.557,00	10.609.219.525,00	93,28
5.1.19.1.19.04	Badan Kesbangpol	6.141.624.933,99	5.802.220.833,00	94,47	6.976.324.062,00	6.606.593.680,00	94,7
5.1.20.1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.693.351.800,00	9.408.773.758,00	97,06	9.684.078.650,00	9.440.374.521,00	97,48
5.1.20.1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.536.260.165,00	1.402.524.760,00	91,29	1.563.983.480,00	1.472.729.869,00	94,17
5.1.20.1.20.03	Sekretariat Daerah	463.720.499.749,86	443.017.247.031,62	95,54	553.251.730.683,35	518.204.062.123,83	93,67
5.1.20.1.20.04	Sekretariat Dewan	27.553.558.663,77	23.849.105.809,00	86,56	30.715.780.297,00	28.135.595.665,50	91,6
5.1.20.1.20.06	Badan Litbang Daerah	6.893.829.075,63	6.432.123.581,00	93,3	8.497.863.740,00	8.035.572.171,00	94,56
5.1.20.1.20.07	Inspektorat Provinsi	10.827.685.073,00	9.350.129.424,00	86,35	11.678.644.275,00	10.736.384.192,00	91,93

Kode Rekening	Dinas/Instansi	Belanja Daerah Tahun 2010			Belanja Daerah Tahun 2011		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5.1.20.1.20.08	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	9.251.703.333,33	8.145.042.759,00	88,04	11.961.974.112,00	10.663.360.975,00	89,14
5.1.20.1.20.11	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	43.748.026.658,00	34.918.307.631,00	79,82	58.599.518.180	55.626.767.669	94,93
5.1.20.1.20.12	Sekretariat KORPRI	2.264.936.848,00	1.705.255.439,00	75,29	3.478.302.147,00	3.035.831.949,00	87,28
5.1.21.1.21.01	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	7.868.862.688,00	7.444.094.600,00	94,6	11.968.708.034,00	10.968.981.036,00	91,65
5.1.21.1.21.02	Badan Kepegawaian Daerah	10.332.901.258,00	9.626.832.825,00	93,17	13.367.530.873,00	11.456.000.089,00	85,7
5.1.25.1.25.01	KPID	2.813.346.321,00	1.001.861.948,00	35,61	2.631.266.961,00	2.179.536.042,00	82,83
5.1.25.1.25.02	Kantor Pengolahan Data Elektronik	3.965.800.582,61	3.548.637.697,00	89,48	4.040.962.740,00	3.857.298.371,00	95,45
5.1.26	Badan Perpustakaan dan Arsip	8.627.850.134,00	8.516.779.108,00	98,71	9.326.217.914,00	8.657.322.118,00	92,83
5.1.27.1.27.01	Bakorluh dan Ketahanan Pangan	12.327.631.896,00	11.060.555.126,00	89,72	8.764.307.361,00	8.147.037.788,00	92,96
5.2.01.2.01.01	Sekretariat Bakorluh				7.613.433.249,00	6.821.844.756,00	89,6
5.2.01.2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	21.521.205.827,44	20.532.215.180,00	95,4	31.974.780.996,00	26.987.782.117,00	84,4
5.2.01.2.01.02	Dinas Perkebunan	79.708.128.279,00	76.026.911.508,00	95,38	28.658.409.257,00	27.266.905.390,00	95,14
5.2.01.2.01.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.228.020.889,00	13.946.854.247,00	91,59	16.870.579.904,00	15.493.937.974,00	91,84
5.2.02.2.02.01	Dinas Kehutanan	16.850.515.197,00	14.459.223.509,00	85,81	18.958.096.024,00	16.309.594.546,00	86,03
5.2.03.2.03.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.324.021.172,18	5.801.125.018,00	91,73	7.708.001.244,00	7.321.181.436,00	94,98
5.2.05.2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.216.855.482,00	15.254.012.149,00	94,06	19.234.360.896,00	18.002.186.694,00	93,59
5.2.07.2.07.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.547.197.330,00	13.123.422.189,00	90,21	16.970.030.002,00	15.586.363.858,00	91,85
J u m l a h		1.596.391.473.716,00	1.488.130.349.597,62	93,22	1.938.926.763.736,35	1.749.689.252.177,33	90,24

3.2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota serta belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp809.763.763.276,35 dan terealisasi sebesar Rp759.840.717.762,83 atau 93,83% lebih tinggi dari rencana anggaran.

Belanja Pegawai yang merupakan belanja gaji pegawai selama tahun 2011 terealisasi sebesar Rp386.128.630.565,00 atau 92,23% dari jumlah anggaran, belanja ini lebih besar 14,87% dari realisasi tahun sebelumnya. Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp370.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp135.000.000,00 atau sebesar 36,49% dari jumlah anggaran, belanja subsidi ini mengalami peningkatan 3,85% dari total realisasi tahun lalu.

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp25.058.147.248,00 dan terealisasi sebesar Rp22.187.375.500,00 atau terealisasi sebesar 88,54%. Belanja bantuan sosial pada tahun 2011 sebesar dianggarkan Rp59.969.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp55.988.739.100,00 atau sebesar 93,36% penganggaran belanja bantuan sosial ini lebih besar dari tahun 2010.

Belanja bagi hasil kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp291.424.772.448,00 dan telah terealisasi sebesar Rp291.345.987.149,83,00 atau sebesar 99,97%, Alokasi belanja ini lebih besar dari tahun 2010. Belanja bagi hasil ini merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota yang terdiri dari belanja bagi hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB, Belanja Bagi Hasil Pajak Air permukaan, Belanja Bagi Hasil Pajak Air Bawah Tanah, Belanja Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air dan bagi hasil BBN Kendaraan di atas Air.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa sebesar Rp935.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp929.835.448,00 atau 99,45% yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Sungai Penuh, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota (Kegiatan PORPROV).

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp13.370.000.000 dengan realisasi sebesar Rp3.125.150.000,00 atau sebesar 23,37%. Secara rinci belanja tidak langsung dapat tergambar pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2010–2011

Uraian	2010			%	2011			2010 :
	Target	Realisasi			Target	Realisasi		2011
1	2	3	4		5	6	7	8
BELANJA TIDAK LANGSUNG	716.793.849.428,39	672.267.046.822,62	93,79		809.763.763.276,35	759.840.717.762,83	93,83	113,03
Belanja Pegawai	368.951.230.878,39	336.141.291.258,00	91,11		418.636.543.580,35	386.128.630.565,00	92,23	114,87

Uraian	2010			%	2011			2010 : 2011 %
	Target	Realisasi			Target	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	7	8
Belanja Subsidi	362.720.000,00	130.000.000,00	35,84		370.000.000,00	135.000.000,00	36,49	103,85
Belanja Hibah	70.094.307.833,00	64.358.880.704,62	91,82		25.058.147.248,00	22.187.375.500,00	88,54	34,47
Belanja Bantuan Sosial	39.540.660.000,00	37.191.081.892,00	94,06		59.969.300.000,00	55.988.739.100,00	93,36	150,54
Belanja Bagi Hasil	222.944.930.717,00	222.916.085.468,00	99,99		291.424.772.448,00	291.345.987.149,83	99,97	130,7
Belanja Bantuan Keu	9.900.000.000,00	9.900.000.000,00	100		935.000.000,00	929.835.448,00	99,45	9,39
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	1.629.707.500,00	32,59		13.370.000.000,00	3.125.150.000,00	23,37	191,76

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2011

3.2.2.2 Belanja Langsung

Komponen utama Belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan program pembangunan tahunan dan tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang ditetapkan setiap tahunnya. Komposisi penyediaan anggaran belanja langsung 54,80% dari total belanja daerah, hal ini mencerminkan bahwa struktur APBD Provinsi Jambi memberikan porsi yang cukup besar untuk pembangunan daerah.

Penyediaan anggaran belanja langsung tahun 2011 lebih tinggi dari anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,24% dan 55,10% pada tahun 2010 dari total belanja daerah, yang dialokasi untuk Belanja pegawai sebesar Rp73.462.531.692,00 atau terealisasi sebesar 92,69%, belanja barang dan jasa disediakan anggaran sebesar Rp443.670.280.331,00 atau terealisasi sebesar 90,81% serta belanja modal dianggarkan sebesar Rp612.030.188.437 atau terealisasi sebesar 84,76%. Anggaran Belanja langsung tersebar pada 43 Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Jambi dan secara umum telah terealisasi 87,66% dari target belanja langsung. Untuk lebih jelas dapat digambarkan pada tabel 3.12.

Tabel 3.13. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2010-2011

Uraian	2010			%	2011			2010 : 2011 (%)
	Target	Realisasi			Target	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	7	8
Belanja Langsung	879.597.624.287,61	815.863.302.775	92,75		1.129.163.000.460	989.773.534.414,50	87,66	121,32
Belanja Pegawai	58.964.249.140,61	53.961.942.558	91,52		73.462.531.692	68.095.370.607,00	92,69	126,19
Belanja Barang dan Jasa	324.615.046.716,00	296.041.039.214	91,2		443.670.280.331	402.912.867.757,50	90,81	136,1
Belanja Modal	496.018.328.431,00	465.860.321.003	93,92		612.030.188.437	518.765.296.050,00	84,76	111,36

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2011

Tabel 3.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis dan Kelompok Belanja Per SKPD tahun anggaran 2011

Kode Rekening	Dinas/Instansi	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung					
		Belanja Pegawai		Belanja Pegawai		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	17.773.328.969,00	16.298.134.949,00	7.956.914.450	6.879.410.900	74.254.557.350	67.768.467.078,00	60.799.228.200	59.042.845.200
5.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	19.890.165.031,00	18.747.758.574,00	1.858.109.000	1.682.155.000	17.633.862.100	17.031.690.274,00	3.136.276.100	2.902.694.363
5.1.02.1.02.02	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	48.012.694.950,00	45.411.559.433,00	24.545.177.872	23.590.289.767	38.080.806.728	33.333.804.776,00	32.939.769.000	29.708.311.225
5.1.02.1.02.03	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	11.472.880.768,00	11.204.708.345,00	2.174.274.000	2.143.812.090	7.852.422.800	7.361.642.950,00	4.073.482.200	3.621.695.460
5.1.03.1.03.06	Dinas Pekerjaan Umum	22.293.379.999,00	20.973.739.373,00	1.253.776.000	1.170.603.100	55.324.182.600	53.246.430.519,00	432.860.353.400	47.357.533.428
5.1.06.1.06.01	BAPPEDA	5.500.846.234,00	5.091.285.871,00	2.078.987.000	1.967.484.000	8.008.155.163	7.556.614.675,00	1.450.974.537	1.322.766.061
5.1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan	9.932.198.816,00	9.198.075.979,00	1.589.061.000	1.269.465.000	5.172.724.000	4.890.596.807,00	4.827.615.000	4.395.603.650
5.1.08.1.08.02	Badan Lingkungan Hidup	4.295.576.623,00	3.979.975.868,00	274.782.000	240.170.500	2.603.059.900	2.242.693.457,00	1.083.426.000	1.059.391.000
5.1.11	Badan Pemberdayaan Masy. dan PP	4.330.847.814,00	3.877.520.812,00	411.395.000	385.720.000	4.153.292.000	3.899.817.457,00	735.334.000	715.119.500
5.1.13.1.13.01	Badan Penanggulangan Bencana	2.837.370.752,00	2.440.890.900,00	501.000.000	431.103.000	3.607.240.000	2.223.969.402,00	812.145.000	2.020.176.182
5.1.14.1.14.02	Dinas Sosnakertrans	21.795.842.138,00	20.270.481.767,00	1.513.139.000	1.484.454.000	8.615.761.500	8.055.803.177,00	701.298.500	692.119.500
5.1.15.1.15.01	Dinas Koperasi UMKM	5.449.349.305,00	4.988.323.424,00	310.411.000	304.991.000	4.404.046.500	4.308.485.751,00	1.101.767.000	1.017.077.875
5.1.16.1.16.01	BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu	3.733.039.544,00	3.414.073.036,00	371.095.000	283.900.000	2.438.470.000	1.948.802.861,00	241.750.000	231.485.000
5.1.17.1.17.02	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.599.446.313,00	7.936.645.141,00	1.181.556.900	1.158.557.500	5.994.201.100	5.802.284.301,00	2.720.110.500	2.666.813.750
5.1.18.1.18.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.796.858.942,00	4.486.765.149,00	1.843.758.220	1.773.508.000	5.429.186.780	5.213.505.010,00	3.426.182.500	3.342.984.455
5.1.19.1.19.03	Satuan Polisi Pamong Praja	8.214.207.157,00	7.727.732.752,00	655.329.000	614.669.000	2.132.099.400	1.921.568.173,00	371.300.000	345.249.600
5.1.19.1.19.04	Badan Kesbangpol	3.427.511.062,00	3.159.361.193,00	572.825.000	565.265.500	2.342.704.000	2.256.122.987,00	633.284.000	625.844.000
5.1.20.1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.684.078.650,00	9.440.374.521,00						

Kode Rekening	Dinas/Instansi	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung					
		Belanja Pegawai		Belanja Pegawai		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.20.1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil KDH	1.563.983.480,00	1.472.729.869,00						
5.1.20.1.20.03	Sekretariat Daerah			8.792.924.750	8.157.427.600	73.709.995.050	65.544.869.828,00	29.778.854.000	28.530.084.626
5.1.20.1.20.03.1.1	Belanja Pegawai	49.842.737.187,35	42.184.592.872,00						
5.1.20.1.20.03.1.3	Belanja Subsidi	370.000.000,00	135.000.000,00						
5.1.20.1.20.03.1.4	Belanja Hibah	25.058.147.248,00	22.187.375.500,00						
5.1.20.1.20.03.1.5	Belanja Bantuan Sosial	59.969.300.000,00	56.063.739.100,00						
5.1.20.1.20.03.1.6	Belanja Bagi Hasil	291.424.772.448,00	291.345.987.149,83						
5.1.20.1.20.03.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	935.000.000,00	929.835.448,00						
5.1.20.1.20.03.1.8	Belanja Tidak Terduga	13.370.000.000,00	3.125.150.000,00						
5.1.20.1.20.04	Sekretariat Dewan	4.552.172.697,00	4.247.735.297,00	2.310.917.000	2.040.591.000	21.862.855.600	19.894.949.818,50	1.989.835.000	1.952.319.550
5.1.20.1.20.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.047.863.740,00	3.747.521.896,00	559.025.000	508.586.500	3.197.754.000	3.106.216.775,00	693.221.000	673.247.000
5.1.20.1.20.07	Inspektorat Provinsi	5.332.508.275,00	5.001.822.668,00	464.249.000	319.591.000	5.466.287.000	5.005.310.524,00	415.600.000	409.660.000
5.1.20.1.20.08	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	3.161.974.112,00	2.899.779.601,00	943.444.000	923.152.000	6.995.286.000	6.029.795.874,00	861.270.000	810.633.500
5.1.20.1.20.11	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	40.606.325.680	39.725.185.993	566.720.000	428.260.000	10.572.992.500	9.040.735.866	6.853.480.000	6.432.585.810
5.1.20.1.20.12	Sekretariat KORPRI	1.728.302.147,00	1.501.235.698,00	324.300.000	240.498.000	1.078.943.000	952.128.251,00	346.757.000	341.970.000
5.1.21.1.21.01	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	4.341.743.574,00	4.019.954.141,00	1.366.676.000	1.263.965.900	4.974.788.460	4.433.927.445,00	1.285.500.000	1.251.133.550
5.1.21.1.21.02	Badan Kepegawaian Daerah	8.803.584.773,00	7.394.666.093,00	1.348.119.000	1.209.682.350	2.755.723.100	2.414.885.146,00	460.104.000	436.766.500
5.1.25.1.25.01	KPID	1.149.266.961,00	707.033.114,00	289.623.000	289.206.000	782.321.500	774.478.563,00	410.055.500	408.818.365
5.1.25.1.25.02	Kantor Pengolahan Data Elektronik	1.902.204.740,00	1.761.980.466,00	266.683.000	266.574.000	1.470.125.000	1.431.564.905,00	401.950.000	397.179.000

Kode Rekening	Dinas/Instansi	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung					
		Belanja Pegawai		Belanja Pegawai		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.26.1.26.01	Badan Perpustakaan dan Arsip	6.167.497.514,00	5.756.256.403,00	471.224.000	460.879.000	2.123.496.400	1.894.843.715,00	564.000.000	545.343.000
5.1.27.1.27.01	Badan Ketahanan Pangan	5.178.069.461,00	4.761.525.589,00	279.733.000	277.363.000	2.882.124.900	2.688.260.699,00	424.380.000	419.888.500
5.1.27.1.27.02	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	3.567.247.349,00	2.896.334.432,00	661.359.000	638.735.500	2.806.906.900	2.712.674.824,00	577.920.000	574.100.000
5.2.01.2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	17.119.780.996,00	16.142.509.065,00	886.935.000	859.828.000	11.103.895.000	7.179.053.552,00	2.864.170.000	2.806.391.500
5.2.01.2.01.02	Dinas Perkebunan	10.287.109.257,00	9.446.522.915,00	808.161.000	762.616.000	15.077.820.000	14.711.762.475,00	2.485.319.000	2.346.004.000
5.2.01.2.01.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.757.579.904,00	6.177.854.918,00	1.609.584.000	1.450.762.200	6.468.881.000	5.935.857.256,00	2.034.535.000	1.929.463.600
5.2.02.2.02.01	Dinas Kehutanan	9.288.919.024,00	8.057.862.158,00	757.473.000	542.503.700	7.064.317.000	5.942.521.488,00	1.847.387.000	1.766.707.200
5.2.03.2.03.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.266.086.744,00	3.041.194.013,00	163.372.500	154.562.000	1.509.657.000	1.410.651.823,00	2.768.885.000	2.714.773.600
5.2.05.2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.694.785.896,00	7.096.599.974,00	837.624.000	774.895.500	9.663.901.000	9.141.949.220,00	1.038.050.000	988.742.000
5.2.06.2.07.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.237.177.002,00	9.440.326.303,00	662.795.000	580.133.000	4.055.438.000	3.604.130.055,00	2.014.620.000	1.961.774.500
		809.763.763.276,35	759.915.717.762,83	73.462.531.692	68.095.370.607	443.670.280.331	402.912.867.757,50	612.030.188.437	518.765.296.050

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2011